



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA KERJA
2022

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Jalan
A.Mappanyukki No.5



(0481)27988



dlh@bone.go.id



dlh.bone.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai amanat perundangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2022 merupakan penjabaran Rencana Strategis DLH Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (Renja PD) ini disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun dan Pengarah Renja yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renja yang diharapkan sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Semoga referensi Renja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Watampone, 8 Juli 2021


KEPALA DINAS
A. SYAFI'UL SAMSU, SE, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19630702 199303 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

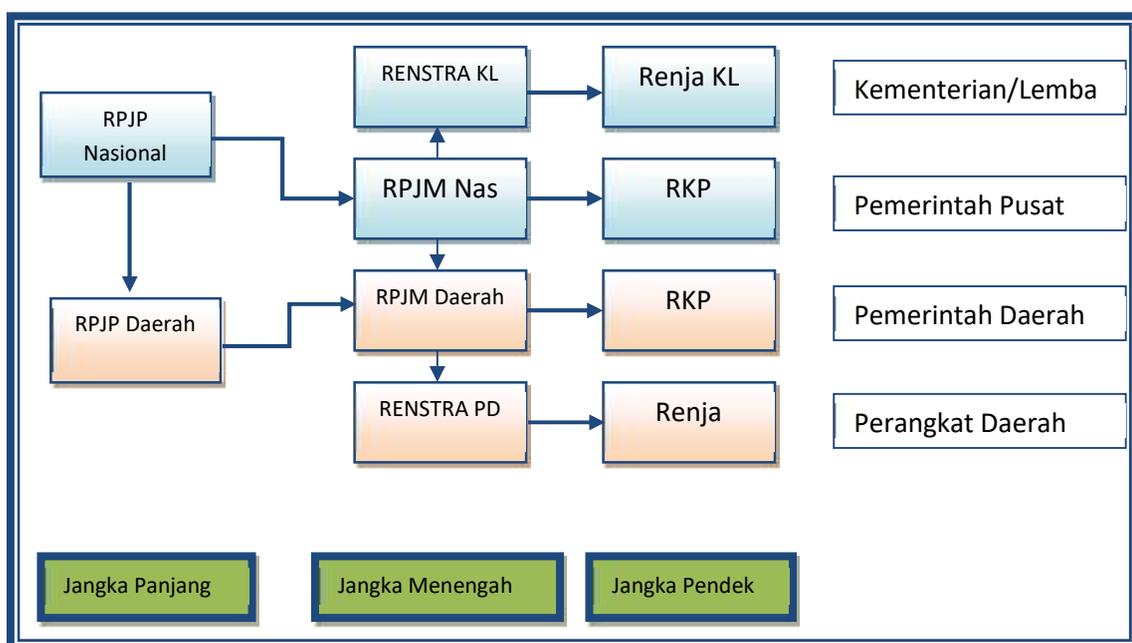
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tingkatan perangkat daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra perangkat daerah), sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra perangkat daerah memuat Tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Hubungan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai pedoman dalam menyusun Renstra SKPD dan bersifat indikatif, maksud bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik sumber daya yang diperlukan maupun dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat daerah yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone.

Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dari program dan kegiatan di tahun berjalan.



Bagan Alir Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan dengan Renja Perangkat daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang langsung dikerjakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tema RKPD Kabupaten tahun 2021 Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Meningkatkan Investasi Yang Kondusif Menuju Sustainable Development.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup dan mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup
- b. Pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup daerah kepada masyarakat
- c. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan setiap tahunnya secara langsung ataupun tidak langsung yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra) dimana didalamnya memuat sasaran dan program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan kemampuan baik secara internal maupun eksternal beserta berbagai peluang dan ancaman yang mungkin timbul. Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Kerja (Renja), yang disusun setiap tahun oleh Dinas LH dalam bentuk kegiatan operasional terperinci. Melalui Rencana Kerja Tahunan diupayakan untuk mengadakan perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan sehingga pengelolaannya sejalan dengan pelestarian lingkungan. Rencana Kerja DLH Tahun 2022 menguraikan seluruh program dan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang dan bagian Sekretariat.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Daerah Nomor 5);
- q. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Nomor 60);
- r. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kab Bone No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2022 adalah Menjabarkan lebih lanjut Rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2018-2023;

Tujuan

1. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan anggaran (RKA-DLH) Tahun 2022
2. Menjadi dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan lingkungan hidup.
3. Mewujudkan komitmen bersama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat dalam penyelenggaraan program pembangunan urusan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Bone.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan , Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu, berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat daerah (Tabel TC.29), Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah (Tabel TC.30), isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD (TC.31) dan penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat (TC.32)

Bab III Tujuan dan Sasaran perangkat daerah berisi telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja perangkat daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah, menyajikan gambaran rencana kerja perangkat daerah secara rinci tentang program dan kegiatan, lokasi, kelompok sasaran beserta pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab V Penutup, menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas rencana kerja perangkat daerah pada tahun perencanaan.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2020 dan capaian Renstra Perangkat daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bone adalah kegiatan berkaitan dengan Administrasi Perbandingan dan Program yang dapat dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bone kedepan khususnya bidang Lingkungan Hidup.

A. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri atas lima kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bone dialokasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.116.838,- realisasi Keuangan 86 %.

Sedangkan kegiatan fisik 100%.

2) Penyediaan Jasa Administasi Keuangan

Kegiatan Ini Merupakan pendukung dalam rangka penataan administrasi umum dan keuangan untuk mencapai tertib pelaporan tepat waktu. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 112.411.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.000.000,- realisasi Keuangan 88 %

sedangkan kegiatan fisik 100%.

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu peningkatan wawasan aparatur khususnya dalam Bidang Lingkungan Hidup, kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 21.500.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 21.490.000,-dengan realisasi Keuangan 99,76 % dan fisik 100%.

4) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah

Dalam Rangka peningkatan pelayanan dan untuk memperlancar kegiatan tugas dan fungsi khususnya Urusan Lingkungan Hidup perlu adanya kegiatan koordinasi dan konsultasi, kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 150.532.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 144.004.119,- dengan realisasi Keuangan 96 %

5) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab.Bone dialokasikan dana sebesar Rp. 144.004.119,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 144.004.119,- realisasi 100%.

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri atas empat kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini sebagai sarana pendukung perkantoran,pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- atau realisasi 100% sedangkan kegiatan fisik 100%

2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini sebagai sarana pendukung perkantoran,pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 42.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.600.000,- atau realisasi 100% sedangkan kegiatan fisik 100%.

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini untuk menjaga / memelihara kondisi gedung kantor sehingga bangunan tetap terjaga, pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.974.000,- atau realisasi 100% sedangkan fisik 100% dengan output pemeliharaan rutin gedung kantor 3 paket.

4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dalam rangka peningkatan kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab.Bone,kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 88.000.000,- dengan realisasi anggaan sebesar Rp. 63.545.569,- atau realisasi 72% sedangkan fisik 100 % dengan capaian terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional yaitu mobil sebanyak 3 unit dan motor sebanyak 33 unit.

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini menjaga / memelihara peralatan kantor,pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 4.845.000,- atau 97% . Terdiri dari pemeliharaan computer, Printer dan AC.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini terdiri dari dua kegiatan penunjang dalam rangka peningkatan disiplin Aparatur Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kegiatan ini ditargetkan untuk mengadakan pakaian dinas untuk Aparatur DLH namun karena adanya refocusing anggaran maka kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tidak dapat dilaksanakan

2. Pengadaan pakaian kerja Lapangan.

Kegiatan ini ditargetkan untuk pengadaan pakaian kerja lapangan yang diperuntukkan untuk petugas pesampahan berupa pakaian pelindung Diri dengan target 80 pasang pakaian Kerja lapangan dengan anggaran Rp 80.000.000 dan Realisasi anggaran Rp 80.000.000,-

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini tidak ditargetkan untuk mengikut sertakan aparat DLH mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal utamanya Program Pelatihan Kepemimpinan untuk pejabat eselon yang belum pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV namun karena adanya refocusing anggaran maka kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan

2. Kegiatan Bimbingan Tekhnis dan implementasi peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengikutsertakan aparat DLH untuk mengikuti Bimbingan teknis dan Kursus kursus singkat untuk menambah wawasan dan kecakapan serta untuk meningkatkan kapasitas aparatur DLH dengan target 5 Orang namun karena adanya Refocusing maka target diubah menjadi 2 Orang dengan Anggran Rp 7.600.000 dan Realisasi 100 %

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 30.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.843.317,- atau realisasi 99% sedangkan fisik 100%.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD 2019)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP 2019)

Laporan Evaluasi Renja Triwulan 1 sampai 4.

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per bulan

6. Program Penunjang Pemerintahan Umum

1. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 15.525.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.358.083,- realisasi 99% sedangkan fisik 100 %.

Dengan output

Renja 2021

RKA 2021

Renja Perubahan 2020

RKA Perubahan 2020

Finalisasi Renstra 2018 – 2023.

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1) Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kegiatan ini menunjang persediaan sarana dan prasarana pada kantor Dinas Lingkungan Hidup kab Bone, Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 1.110.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.110.000.000,-

Dengan Output

- Belanja Bahan baku bangunan (tanah Urug TPA)
- Belanja 100 Unit Tong Sampah yang diserahkan Kemasyarakatan
- Belanja Kontainer Sampah 4 Unit
- Belanja tong sampah roda 10 buah

2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan.

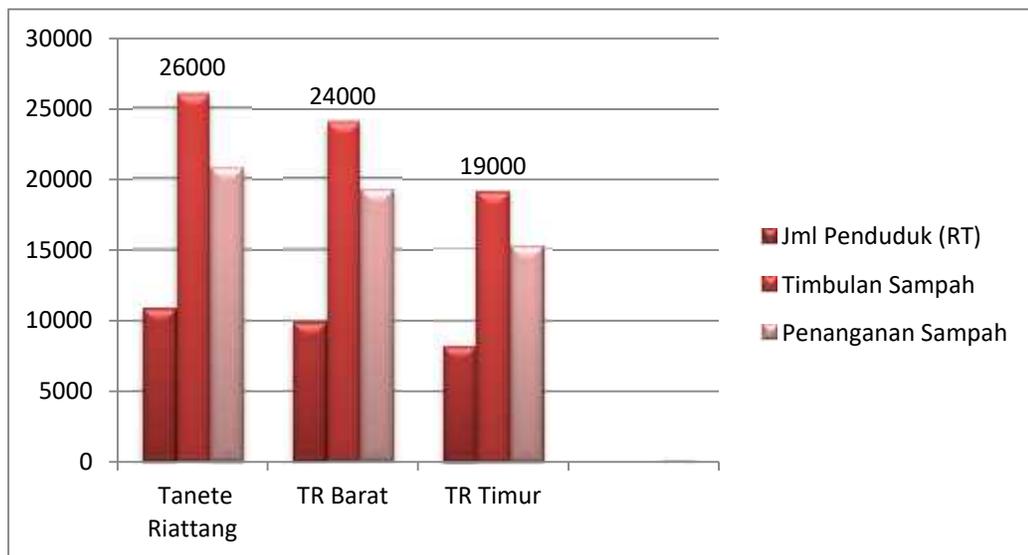
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 4.980.197.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.390.625.100,- dengan output berupa belanja jasa/upah kerja, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja bahan bakar minyak

Belanja jasa/upah kerja 273 orang yang terdiri dari

) Sopir Mobil Sampah	17 Orang
) Operator Alat Berat	3 Orang
) Buruh Persampahan	41 Orang
) Pengendara Motor Sampah	32 Orang
) Penyapu	75 Orang
) Petugas Lumpur Saluran	13 Orang
) Petugas TPA	6 Orang
) Petugas Mesin Rumput	10 Orang
) Petugas Lapangan	75 Orang

Belanja perawatan kendaraan operasional persampahan terdiri dari belanja jasa service, Suku cadang dan belanja Bahan Bakar Minyak.

Belanja makan minum pekerja persampahan.



Gambar Grafik penanganan sampah diwilayah perkotaan

Penanganan Sampah di Tiga Kecamatan Kota (Kecamatan Tanete Riattang, TR Barat dan TR Timur)

Kecamatan Tanete Riattang Jumlah penduduk 10.800 Rumah tangga dengan timbulan sampah sebesar 26 ton dan Jumlah sampah terangkut ke TPA 20.8 ton, Kecamatan Tanete Riattang Barat Jumlah penduduk 9.818 Rumah tangga dengan timbulan sampah sebesar 24 Ton dan jumlah sampah terangkut 19,2 Ton dan Kecamatan Tanete Riattang Timur Jumlah penduduk 8.142 Rumah tangga dengan timbulan sampah sebesar 19 Ton dan jumlah sampah terangkut 15,2 Ton.

Grafik ini menggambarkan penanganan sampah diwilayah perkotaan

3) Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan.

Kegiatan ini maksudkan untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga yang kemudian akan dibina beberapa kelompok dalam suatu kawasan perumahan, namun pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid sehingga anggarannya dialihkan ke penanganan covid 19.



Gambar. Pengukuhan Satgas Bone Bersih Sampah oleh Bupati Bone

8. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bone merupakan Dinas Teknis Daerah yang menangani pengendalian dan pencemaran perusakan lingkungan hidup, dan mendukung kota sehat dalam rangka peningkatan kebersihan untuk meraih adipura. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 215.710.000,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 178.719.400, - , atau realisasi sebesar 83% dan fisik 100%.

Output dari kegiatan ini dengan melaksanakan Sosialisasi Kriteria Penilaian Adipura salah satu nya adalah penanganan sampah rumah tangga, dengan mengundang para pemangku kepentingan urusan Lingkungan.



2) Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan dimaksudkan untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 59.778.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.352.000,- atau realisasi sebesar 91% dan fisik 100%.

Output Kegiatan ini dengan melaksanakan pemantauan kualitas Air, tanah dan Udara

Titik Pemantauan Kualitas Air

Titik Pemantauan	Status
1. Sungai Jaling Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone	Cemar Ringan
2. Mata Air Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone	Cemar Ringan
3. Sungai Lonrong Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone	Cemar Ringan
4. Desa Sengeng Palie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone	Cemar Ringan
5. Sungai Sumpang Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone	Cemar Ringan
6. Tanjung Palette Kecamatan Tanete Riattang Timur	Cemar Ringan
7. Sungai Kaluppang Desa Poleonro Kecamatan Libureng	Cemar Ringan
8. Sungai Sampie Desa Liliriattang Kecamatan Lappariaja	Cemar Ringan
9. Sungai Kaju Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue	Cemar Ringan
10. Sungai Watu Kecamatan Barebbo	Cemar Ringan
11. Sungai Sampie Unyi Uloe Kecamatan Dua Boccoe	Cemar Ringan
12. Sungai Tobunne Gona Kecamatan Kajuara	Cemar Ringan
13. Sungai Bulu-Bulu Kecamatan Tonra	Cemar Ringan
14. Sungai Cenrana Kabupaten Bone	Cemar Ringan
15. Sungai Teko Kecamatan Cina	Cemar Ringan
16. Sungai Kadai Kecamatan Mare	Cemar Ringan
17. Sungai Cabalu Mattirowalie Kecamatan Tanete Riattang	Cemar Ringan
18. Sungai Salomekko	Cemar Ringan

Titik Pemantauan Kualitas Tanah

Titik Pemantauan	Status
Cinnong Kecamatan Ulaweng	Tidak Rusak
Kecamatan Palakka	Tidak Rusak
Kecamatan Sibulue	Tidak Rusak
Kecamatan Ajangale	Tidak Rusak

Titik Pemantauan	Status
Desa Liliriattang Kecamatan Lappariaja	Tidak Rusak
Kecamatan Libureng	Tidak Rusak
Desa Walimpong Kecamatan Bengo	Tidak Rusak
Kelurahan Palette Kecamatan Tanete Riattang Timur	Tidak Rusak
Pelabuhan Cappa Ujung Kecamatan Sibulue	Tidak Rusak
Desa Sengeng Palie Kecamatan Patimpeng	Tidak Rusak
Desa Masago Kecamatan Patimpeng	Tidak Rusak

Titik Pemantauan Kualitas Udara

Titik Pemantauan	Status
Depan Rujab Bupati Bone	Tidak Tercemar
Kompleks Perumahan Pepabri Kabupaten Bone	Tidak Tercemar
SMA Negeri 3 Bone	Tidak Tercemar
Kampus STKIP Bone Jl. Abu Dg. Pasolong	Tidak Tercemar
Depan Pelabuhan Bajoe Bone	Tidak Tercemar
Lokasi Kantor Bupati Bone	Tidak Tercemar
RSUD Tenriawaru Bone	Tidak Tercemar
Terminal Kabupaten Bone	Tidak Tercemar
Depan STIA Prima Jl. Urip Sumoharjo Kabupaten Bone	Tidak Tercemar
Depan Bone Trade Center (BTC)	Tidak Tercemar
AMP Ridwan Jaya Stone Kecamatan Palakka Kabupaten Bone	Tidak Tercemar

3) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Dalam rangka untuk menertibkan pelaksanaan usaha atau kegiatan para pemrakarsa harus memiliki dokumen kelayakan lingkungan hidup, hal ini merupakan bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, maka pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 26.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.280.000,-

Target Pengawasan 55 Perusahaan namun dengan kondisi Pandemi Covid 19 kegiatan pengawasan hanya 46 usaha yang dapat dipantau dan diawasi.

Dari 46 Usaha yang diawasi terdapat 18 Usaha yang tdk taat terhadap ijin lingkungan yang diterbitkan.

4) Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 21.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.483.000,- dengan output Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Selama masa Pandemi Covid 19

5) Pengkajian Dampak Lingkungan

Kegiatan pengkajian dampak lingkungan dimaksudkan untuk melakukan kegiatan yang dikaji serta memperoleh rekomendasi izin LH. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 23.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.940.000,- atau realisasi anggaran 100 % dan capaian fisik 124% (capaian melebihi dari target kinerja)

Target Kinerja Kegiatan 55 Kajian dampak Lingkungan, sedangkan realisasi terdapat 68 kegiatan kajian dokumen lingkungan yang dilaksanakan terdiri dari 66 Kajian UKL UPL dan 2 kajian DELH/Amdal.



Gambar .Kajian Dokumen Amdal

6) Pengembangan Produksi ramah Lingkungan

Kegiatan ini dilakukan untuk pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ternak Menjadi bahan baku gas yang digunakan oleh masyarakat pra sejahtera, namun pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid sehingga anggarannya dialihkan ke penanganan covid 19.

9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dimaksudkan untuk sosialisasi dan pembinaan kampung iklim dengan dana sebesar Rp. 47.138.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.429.200,- atau realisasi sebesar 96% dan fisik 100 %.

Capaian output

LOKASI PROKLIM YANG DIUSULKAN TAHUN 2020		
NO	NAMA LOKASI	KATEGORI
1.	Dusun Wanuae Desa Poleonro Kecamatan Lamuru	ProKlim Lestari
2.	Dusun Langkana Desa MattampawaliE Kecamatan Lamuru	ProKlim Utama
3.	Dusun Bontosua Desa Cumpiga Kecamatan Awangpone	ProKlim Utama
4.	Dusun Samaenre Desa PitumpidangE Kecamatan Libureng	ProKlim Utama

2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

pada kegiatan ini dimaksudkan untuk menangani pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan juga kasus kasus lingkungan, Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.833.000,- sisa dana Rp. 167.000 atau 80 % dan fisik 100% dengan capaian terlaksananya pelayanan pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

10. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1). Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 40.820.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.090.000

dengan capaian terbinanya dan tertatanya sekolah berbudaya dan peduli lingkungan

SDN 27 Pasippo

SD Inpres 5/81 Pasippo

SDN 40 Maccope

SD Inpres 5/81 Awolagading

SDN 16 Talungeng

SD Inpres 6/75 Kading

SD Inpres 5/81 Watu

SMPN 1 Sibulue

2). Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan hidup untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 13.038.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.860.000, atau realisasi sebesar 76 % dan fisik 100 %

11. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1.) Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Dan Limbah Cair

Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya kegiatan pengambilan dan pengujian sampel air dan emisi oleh Laboratorium Lingkungan dibawah koordinasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dialokasikan dana sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.680.000,- sisa dana Rp. 320.000,- atau realisasi 70% sedangkan fisik 100% dengan target output 69 Lembar Hasil Uji (LHU) sedangkan capaian 69 LHU.

(Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2020 dan capaian Renstra Perangkat daerah disajikan dalam tabel C.29)

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Eavlusi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
			A	B	B	B	100%	BB		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.11.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80.00%
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	21	8	4	4	100%	5	17	80.95%
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	11	4	2	2	100%	2	8	72.73%
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80.00%	80.0%
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	24	12	12	100%	12	48	80.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.11.01.2.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	6	0	0	-	-	2	2	33.33%
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bintek	18	5	2	2	100%	5	12	66.67%
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Adminitrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80.00%	80.00%
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	24	12	12	100%	12	48	80.00%
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36	0	0	-	-	12	12	33.33%
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	36	0	0	-	-	12	12	33.33%
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	36	0	0	-	-	12	12	33.33%
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Pembayaran Media	60	24	12	12	100%	12	48	80.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi	322	100	50	50	100%	72	222	68.94%
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah paket penyusunan dan atau pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi	1	0			-	1	1	100.00%
2.11.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	80.00%	80.00%
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubel (unit)	12	4	2	2	100%	1	7	58.33%
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peraltan dan mesin lainnya (unit)	16	5	3	3	100%	3	11	68.75%
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%		0.00%
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran jasa Komunikasi	120	48	24	24	100%	24	96	80.00%
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	24	12	12	100%	12	48	80.00%
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		0.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin	3	6	3	3	100%	3	3	100.00%
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	54	14	7	7	100%	10	31	57.41%
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	3	6	3	3	100%	3	3	100.00%
			54	52	53	52	98%	53	52	96.30%
2.11.02	Program perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	52	53	52	98%	53		0.00%
2.11.02.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RPPLH	100%	40%	-	-	-	20%	60%	60.00%
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH	3	0	0	0	0%	30%	0	10.00%
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusunan dan Penyelenggaraan KLHS Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Laporan Penyusunan KLHS dan Laporan Pelaksanaan	12	5	3	3	100%	3	11	91.67%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.03	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	100%	40%	20%	20%	100%	20%	80%	80%
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	cakupan pemantauan Pencegahan pencemaran LH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media	Jumlah Titik Pemantauan Air, Udara dan tanah	72	120	80	80	100%	80	280	388.89%
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Desa yang dibina menjadi Kampung iklim.	50	20	10	10	100%	10	40	80.00%
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota	persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kerusakan (pemberian Informasi, pengisolasian dan Penghentian	100.00%	40%	20%	20%	100%	20%		0.00%
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberian Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan LH	108	24	24	24	100%	24	72	66.67%
2.11.2.03.03	Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab Kota	Cakupan pelaksanaan Pemulihan dan Pembinaan terhadap sumber pencemar	80%	20%	0	0	-	20%	40%	50.00%
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Sumber Pencemar	Jumlah Pemantauan lokasi Pembersihan Sumberr Pencemar	60	0	0	0	-	12	12	20.00%
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Ternak	14	4	0	0	-	10	14	100.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							-		0	#DIV/0!
2.11.04	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Cakupan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keaneekaragaman hayati;	60%	0	0	0	-	20%	20%	33.33%
2.11.04.2.01	Pengelolaan keaneka ragaman Hayati kab/kota	Cakupan pengelolaan keaneekaragaman hayati;	60%	0	0	0	-	20%	20%	33.33%
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Laporan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	3	0	0	0		1	1	33.33%
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah B3	40%	10%	5%	5%	100%	10%	25%	62.50%
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Peningkatan pengelolaan limbah B3	20%	10%	10%	10%	100%	19%	39%	195.00%
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang dikelola (Ton)	189	38	35	35	100%	43	116	61.38%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase Ketaatan Pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	80%	60%	60%	60%	100%	70%	70%	87.50%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota	Jumlah pelaku usaha/Kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	244	66	33	33	100%	42	141	57.79%
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Ijin Lingkungan yang dikaji	305	110	55	55	100%	60	225	73.77%
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan yang diawasi	305	110	55	55	100%	60	225	73.77%
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Peningkatan Kapasitas LH (persen)	100%	40%	20%	20%	100%	20%	80%	80.00%
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	100%	40%	20%	20%	100%	20%	80%	80.00%
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina	33	10	5	5	100%	5	20	60.61%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	94%	90%	90%	90%	100%	95%	95%	101.06%
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan pengaduan masyarakat yang diselesaikan	97%	40%	100%	100%	100%	90%	90%	92.78%
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab Kota	Jumlah Pelayanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (layanan)	55	18	8	8	100%	10	36	65.45%
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten	40%	25%	25%	25%	100%	30%	30%	75.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani diwilayah	80%	60%	60%	60%	100%	75%	75%	93.75%
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	Jumlah Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan (jakstrada)	5	2	1	1	100%	1	4	80.00%
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Volume Sampah 3 Kecamatan kota yang ditangani (ton)	70.705	28	14	14	100%	14.235	56.235	79.53%
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok yang dibina untuk pengelolaan persampahan (klp)	49	0	0	0		5	5	10.20%
		Jumlah Pengurangan Sampah (ton)	111	0	0	0		35	35	31.53%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi pemerintah yang mengurus masalah lingkungan hidup melakukan tugas utamanya dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan memastikan kondisi lingkungan hidup yang layak serta kondisi lingkungan yang terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Indikator kinerja pelayanan tersebut terlihat pada indikator kinerja utama Dinas Lingkungan hidup yang terdiri dari:

(Tabel Analisis Pencapaian Layanan Kinerja akan disajikan dalam Tabel C- 30)

Tabel T-C. 30 Renja 2022
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bone

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (Tahun n-2)	Tahun 2020 (Tahun n-1)	Tahun 2021 (Tahun n)	Tahun 2022 (Tahun n+1)	Tahun 2019 (Tahun n-2)	Tahun 2020 (Tahun n-1)	Tahun 2021 (Tahun n)	Tahun 2022 (Tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP			B	B	BB	BB	B	B	BB	BB	
	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah			4	4	5	4	4	4	5	4	
	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Persentase Pelaksanaan administrasi Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Persentase pelaksanaan Administrasi kepegawaian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal			0	0	2	2	0	0	2	2	
	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti BinteK			3	2	5	8	3	2	5	8	
	Persentase Pelaksanaan Adminitrasi Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0	0	12	12	0	0	12	12	
	Jumlah laporan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor			0	0	12	12	0	0	12	12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan			0	0	12	12	0	0	12	12	
	Jumlah Laporan Pembayaran Media			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi			50	50	72	75	50	50	72	75	
	Jumlah paket penyusunan dan atau pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi					1				1		
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Pengadaan Meubel (unit)			2	2	1	4	2	2	1	4	
	Jumlah Pengadaan Peraltan dan mesin lainnya (unit)			2	3	3	5	2	3	3	5	
	Peresentase Penyediaan Jasa Penunjang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Rekening Pembayaran jasa Komunikasi			24	24	24	24	24	24	24	24	
	Jumlah laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin			3	3	3	3	3	3	3	3	
	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara			7	7	10	15	7	7	10	15	
	jumlah gedung kantor yang dipelihara			3	3	3	3	3	3	3	3	
	jumlah Penyiapan lahan atau pemeliharaan Lahan					1				1		

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (Tahun n-2)	Tahun 2020 (Tahun n-1)	Tahun 2021 (Tahun n)	Tahun 2022 (Tahun n+1)	Tahun 2019 (Tahun n-2)	Tahun 2020 (Tahun n-1)	Tahun 2021 (Tahun n)	Tahun 2022 (Tahun n+1)	
	1.1. Indeks Kualitas Air		IKK	53	52	53	53	53	52	53	53	
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Cakupan Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RPPLH			-	-	30%	30%	-	-	30%	30%	
	Jumlah Dokumen RPPLH			-	-	1	1	-	-	1	1	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan RPPLH											
	Cakupan penyusunan dan Penyelenggaraan KLHS Kabupaten					100				100		
	Jumlah Laporan Penyusunan KLHS dan Laporan pelaksanaan dan laporan IKLH			3	2	3	2	3	2	3	2	
	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	cakupan pemantauan Pencegahan pencemaran LH			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Titik Pemantauan Air, Udara dan tanah			60	60	80	80	60	60	80	80	
	Jumlah Desa yang dibina menjadi Kampung iklim.			10	10	10	10	10	10	10	10	
	persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kerusakan (pemberian Informasi, pengisolasi dan Penghentian Kerusakan LH)			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Jumlah Kegiatan Pemberian Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan LH			12	12	24	24	12	12	24	24	
	Cakupan pelaksanaan Pemulihan dan Pembinaan terhadap sumber pencemar			20%		20%	20%	20%		20%	20%	
	Jumlah Pemantauan lokasi Pembersihan Unsur Pencemar						24				24	
	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Ternak			4	0	10		4	0	10		
	1.2. Indeks Kualitas Udara		IKK	76 3/5	75	76	77	76 3/5	75	76	77	
	Cakupan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;			-	-	20%	20%	-	-	20%	20%	
	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati;					20%	20%			20%	20%	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau					1	1			1	1	
	1.3 Penghargaan Adipura		IKK	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	
	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone			20	25	30	35	20	25	30	35	
	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani diwilayah Perkotaan			60%	60%	75%	75%	60%	60%	75%	75%	
	Jumlah Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan (jakstrada)			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Volume Sampah 3 Kecamatan kota yang ditangani (ton)		IKK	14.00	14.00	14.24	14.24	14.00	14.00	14.24	14.24	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (Tahun n-2)	Tahun 2020 (Tahun n-1)	Tahun 2021 (Tahun n)	Tahun 2022 (Tahun n+1)	Tahun 2019 (Tahun n-2)	Tahun 2020 (Tahun n-1)	Tahun 2021 (Tahun n)	Tahun 2022 (Tahun n+1)	
	Jumlah Kelompok yang dibina untuk pengelolaan persampahan (klp)			0	0	5	22	0	0	5	22	
	Jumlah Pengurangan Sampah (ton)			0	0	35	37	0	0	35	37	
	Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Unit)			2	2	3		2	2	3		
	Cakupan Kesadaran Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan		IKK	80		70	75	80		70	75	
	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah B3			5%	5%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	
	Persentase Peningkatan pengelolaan limbah B3		IKK	5%	10%	93%	34%	5%	10%	93%	34%	
	Jumlah limbah B3 yang dikelola (Ton)			3	35	43	53	3	35	43	53	
	Persentase Ketaatan Pelaku usaha terhadap hukum lingkungan		IKK	60%	60%	70%	75%	60%	60%	70%	75%	
	Jumlah pelaku usaha/Kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan			33	33	42	48	33	33	42	48	
	Jumlah Ijin Lingkungan yang dikaji			55	55	60	65	55	55	60	65	
	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan yang diawasi			55	55	60	65	55	55	60	65	
	Cakupan Peningkatan Kapasitas LH (persen)			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Persentase Pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina			5	5	5	8	5	5	5	8	
	Cakupan Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup		IKK	90%	90%	95%	95%	90%	90%	95%	95%	
	Persentase Pelayanan pengaduan masyarakat yang diselesaikan			100%	100%	90%	95%	100%	100%	90%	95%	
	Jumlah Pelayanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (layanan)			10	8	10	12	10	8	10	12	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Selanjutnya, permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan perangkat daerah.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup, adalah:

- ♦ Adanya kesulitan dalam menyusun RPPLH karena RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan belum ada untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman penyusunan;
- ♦ Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (Tenaga Fungsional) sehingga pengawasan dilakukan oleh staf DLH yang belum bersertifikat PPPLH;
- ♦ Sulitnya membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan lingkungan;
- ♦ Terbatasnya kemampuan menangani sampah di seluruh wilayah kecamatan karena kurangnya tenaga operasional, armada, dan anggaran operasional;
- ♦ Masih terjadinya pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan sangat potensial mencemari lingkungan, terutama pencemaran air tanah oleh Leachate (air sampah yang dapat menyerap kedalam tanah).

Dinas Lingkungan Hidup mengangkat tiga isu strategis yang terkait dengan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Yang pertama Isu mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim, kedua mengenai Pencemaran lingkungan dan yang ketiga mengenai penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Bone.

Kerawanan terhadap dampak perubahan iklim yang dimiliki Indonesia menjadikan aspek adaptasi perubahan iklim sebagai salah satu prioritas nasional yang utama Indonesia menyadari bahwa mitigasi dan adaptasi harus dijalankan secara simultan oleh semua daerah. Pemerintah Daerah menyadari bahwa penanganan perubahan iklim merupakan bagian tak terpisahkan dari tantangan pembangunan nasional. Perencanaan atas berbagai aspek perubahan iklim seharusnya dijalankan bersamaan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional, sehingga perencanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah (provinsi, kabupaten/kota dan lokal).

Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup mengangkat mitigasi dan adaptasi Perubahan iklim merupakan isu strategis yang perlu dijadikan patokan dalam isu pembangunan daerah. Penurunan emisi GRK dilakukan melalui: (i) penurunan emisi secara langsung dan peningkatan kapasitas serapan GRK, dan (ii) kegiatan yang tidak secara langsung menurunkan emisi GRK seperti kebijakan, peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan, kerangka regulasi, sosialisasi, penelitian tentang potensi penurunan GRK dan kegiatan lain yang mempunyai andil dalam penurunan GRK. Berdasarkan Rencana Aksi nasional penurunan emisi Gas rumah kaca juga sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sampah, Saat ini masalah persampahan adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat, dimana pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan sehingga penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah perkotaan, tetapi umumnya peningkatan jumlah tersebut tidak diikuti oleh prasarana dan sarana persampahan yang memadai sehingga sampah yang tidak tertangani menjadi sumber pencemaran.

Pencemaran Air di Sulawesi Selatan belakangan ini makin signifikan, hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sungai lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran air disebabkan oleh berbagai hal antara lain :

- Sampah organik seperti air comberan (Sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah seluruh ekosistem.
- Buangan limbah pabrik yang mengalir kesungai, dimana mengandung berbagai macam polutan seperti bahan organik, neutrien, dan padatan tersuspensi. Saat ini masalah pencemaran udara adalah merupakan isu yang sangat penting mengingat meningkatnya aktivitas manusia yang setiap hari berpeluang untuk menciptakan polusi udara yang sangat tinggi. Hal ini perlu kita sikapi bersama dengan cara menekan laju pencemaran udara yang terjadi pada daerah kota dan daerah padat industri yang menghasilkan zat di atas batas kewajaran. Gas-gas pencemar udara di antaranya CO, CO₂, NO, NO₂, SO, SO₂.

Semakin banyak kendaraan bermotor dan alat-alat industri yang mencemarkan lingkungan maka akan semakin parah pula pencemaran uadara yang terjadi, kualitas Udara semakin memburuk di sebabkan semakin sempitnya lahan hijau atau pepohonan di suatu daerah untuk itu perlu adanya peran serta pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran udara di Kabupaten Bone.

Isu pokok Penegakan Hukum Lingkungan sampai dengan sekarang ini masih berkisar pada masalah pencemaran oleh pihak industri atau perusahaan, masalah pencemaran

sungai. Pendirian suatu pabrik atau perusahaan dalam suatu ekosistem tertentu akan mempunyai korban pada lingkungan hidup sekitar. Pada awal pembuatan bangunan paling tidak akan membawa pengaruh pada perubahan lahan yang mengakibatkan perataan pohon-pohon dan terganggunya stuktur tanah sekeliling. Dampak positif dari adanya pabrik atau perusahaan misalnya menambah mata pencaharian sebagai tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Efek negatif dari kegiatan tersebut hendaknya ditekan seminimal mungkin agar industri atau perusahaan tersebut memperhatikan lingkungan. Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan di lakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, kehutanan dan lain-lain. Kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat manusia di bumi ini. Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses Rencana Kerja Perangkat daerah telah dimulai sejak awal januari dengan menetapkan 9 Program 18 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, diawali dengan penginputan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Aplikasi SIPD yang kemudian diintegrasikan dengan usulan usulan dari desa dan kecamatan melalui proses sinkronisasi pra musrembang kecamatan.

Inputan perangkat daerah kedalam system integrasi Perencanaan pembangunan kemudian dijadikan dasar penetapan isu strategis kabupaten dalam rancangan awal RKPD. Setelah pelaksanaan Musyawarah Pembangunan daerah maka dilakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan usulan usulan masyarakat maka dilakukan revisi terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah, setelah mereview Rancangan Awal RKPD maka Dinas lingkungan Hidup melaksanakan restrukturisasi terhadap program dan kegiatan mengacu pada tujuan dan sasaran tahun 2018 - 2023, adapun hal yang menjadi pertimbangan untuk merestrukturisasi program dan kegiatan ini berdasarkan review terhadap indikator Permendagri no 86 tahun 2017 dan juga mempertimbangkan Standar Pelayanan pada permendagri no 22 Tahun 2018 , Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018-2023

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan

Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat dan pemangku jabatan diperoleh dari Pokok Pikiran DPR dan juga diperoleh dari usulan masyarakat melalui proses Musyawarah Perencanaan pembangunan.

Usulan Program dan Kegiatan disajikan dalam tabel c.32

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone

No	Program/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Soddange Kel. Biru Kec. T.Riattang	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	1	
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kel. Bajoe Kec. T.Riattang Timur	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	3	
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kel. Cellu Kec. T.Riattang Timur	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	1	
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lingk. Walie Kel. Walannae Kec. T.Riattang	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	1	
5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Polewali Kel. Polewali Kec. T.Riattang Barat	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	2	
6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kel. Bukaka Kec. T. Riattang	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	2	
7	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lingk. Lalebata, Lingk. Harapan, Lingk. Polewali, Lingk. Bukaka, Kel. Bukaka Kec. T. Riattang	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	2	
8	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lingk. Coppoleang, Lingk. Lasotane, Lingk. Bila-Bilae, Lingk. Macanang Kel. Macanang Kec. T.Riattang Barat	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	5	
9	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lingk. Lasonrong, Lingk. Matajang I, Lingk. Matajang II, Lingk. Ponceng I, Lingk. Ponceng II Kel. Manurunge Kec. T. Riattang	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	2	

No	Program/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lingk. Tanah Bangkale, Lingk. Laccokkong, Lingk. Coppomeru, Lingk. Saliweng Kel. Watampone Kec. T. Riattang	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	1	
11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lingk. Waru Kel. Bulu Tempe Kec. T.R. Barat	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	1	
12	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kel. Jeppe'e Kec. T.R. Barat	Pembinaan Kelompok Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kelompok)	1	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan Sasaran strategis yang telah disepakati dan akan dicapai pada tahun 2020-2024 oleh KLHK adalah: 1) terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; 2) tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 3) terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan 4) terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk 5 (lima) tahun ke depan telah memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan nasional serta visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone adalah

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Menurut Peraturan menteri Dalam negeri no 86 Tahun 2017 yang dimaksud dengan **Program** adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi

satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada Renja Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- b) Penyediaan Peralatan Rumah tangga
- c) Penyediaan bahan Logistik Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f) Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Mebel
- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sub kegiatan: Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten

2) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten

Sub Kegiatan: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sub Kegiatan

- a) Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, air, Udara dan Laut
- b) Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

3) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten
Sub Kegiatan

- a) Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar
- b) Koordinasi dan sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten
Sub Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka Hijau

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan
Administrasi dan teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota
Sub Kegiatan

- a) Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten.
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab

9. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan

- a) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten
- b) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- c) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota mencakup Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota. Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

Secara substansial Rencana Kerja, memuat arah kebijakan Dinas Lingkungan hidup, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan penanggung jawab yang wajib dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja DLH; dan Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam urusan Lingkungan Hidup.

Tc. 33

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2																		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					14,499,356,800								9,215,000,000
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,287,356,800								0
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					112,000,000								0
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	5 Dokumen	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 %	47,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,891,590,800								0
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 %	4,891,590,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					69,855,000								0
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Orang	100 %	42,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Orang	100 %	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					674,333,150								0
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 %	80,554,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 %	20,008,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 %	237,711,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	15 Unit	100 %	15,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Unit	100 %	76,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0
2.11.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Penyiapan lahan atau pemeliharaan Lahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0
2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								95,000,000					0
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								45,000,000					0
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen RPPLH	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	20 Persen	0
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								50,000,000					0
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan DIKPLH	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	1 Laporan	3 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	20 Persen	0
2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								1,935,000,000					2,110,000,000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								1,785,000,000					1,750,000,000
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	Jumlah Alat Pemantauan Air (onlimo) Jumlah Lembar Hasil Uji (LHU)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	1 Paket 80 LHU	100 Lokasi	1,615,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	20 Persen	1,750,000,000
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	Jumlah Desa yang dibina menjadi Kampung iklim.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	10 Desa	100 Lokasi	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	20 Persen	0
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								50,000,000					55,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	Jumlah Kegiatan Pemberian Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	20 Persen	24 Kegiatan	40 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	20 Persen	55,000,000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					100,000,000				305,000,000				
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	Jumlah Pemantauan lokasi Pembersihan Sumber Pencemar	Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	24 Kegiatan	100 Lokasi	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	20 Persen	55,000,000
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Ternak Komunal	Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab Kota		20 Persen	0 Unit	100 Lokasi	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran	20 Persen	250,000,000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					428,000,000				0				
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					428,000,000				0				
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Cakupan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keaneekaragaman hayati	Jumlah Ruang terbuka Hijau yang terpelihara.	Pengelolaan keanekaragaman Hayati kab/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	3 Kecamatan	5 Lokasi	428,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keaneekaragaman hayati	10 Persen	0
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					80,000,000				120,000,000				
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3					80,000,000				120,000,000				
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang dikelola (Ton)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Cakupan	53 Ton	19 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah B3	10 Cakupan	120,000,000
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					170,000,000				150,000,000				
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					170,000,000				150,000,000				
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Presentase Ketaatan Pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	Jumlah Ijin Lingkungan yang dikaji	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	65 Ijin LH	49 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Ketaatan Pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	80 Persen	0
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketaatan Pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan yang diawasi	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	65 Usaha	49 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Ketaatan Pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	80 Persen	150,000,000
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					99,000,000				135,000,000				
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					99,000,000				135,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Cakupan Peningkatan Kapasitas LH	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang di bina	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Persen	8 Sekolah	100 %	99,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kapasitas LH	90 Persen	135,000,000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								60,000,000					100,000,000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								60,000,000					100,000,000
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Pelayanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (layanan)	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 layanan	95 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	100 Persen	100,000,000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								5,345,000,000					6,600,000,000
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah								5,345,000,000					6,600,000,000
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone	Jumlah Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan (jakstrada)	Pengelolaan Sampah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Sertifikat	1 Laporan	40 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone	40 Sertifikat	0
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone	Volume Sampah 3 Kecamatan kota yang ditangani	Pengelolaan Sampah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Sertifikat	14.235 Ton	40 %	5,200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone	40 Sertifikat	6,500,000,000
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone	Jumlah Kelompok yang dibina untuk pengelolaan persampahan (klp) Jumlah Pengurangan Sampah dari Hasil Pembinaan	Pengelolaan Sampah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Sertifikat	22 Kelompok 37 Ton	40 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone	40 Sertifikat	100,000,000
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone	Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Unit)	Pengelolaan Sampah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Sertifikat	3 Unit	40 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani di Kabupaten Bone	40 Sertifikat	0
TOTAL									14,499,356,800					9,215,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja tersebut, seluruh pihak yang terkait diharapkan memberikan dukungan dan partisipasi yang optimal dalam pelaksanaannya selama tahun anggaran 2022

Pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur DLH karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Rencana Kerja ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Semoga Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab Bone ini dapat diimplentasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.